

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Banjarmasin

Banjarmasin sebelumnya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan hingga tahun 2022, sebelum kemudian dipindahkan ke Kota Banjarbaru. Secara geografis, kota ini berada di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan luas wilayah sekitar 98,46 km². Secara administratif, Kota Banjarmasin terbagi menjadi lima kecamatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin tahun 2023, jumlah penduduk kota ini tercatat sebanyak 657.663 jiwa.¹

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, Kota Banjarmasin menjadi salah satu wilayah yang memiliki peran strategis dengan dinamika kepemiluan yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari KPU Kota Banjarmasin, jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 498.639 orang yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan lebih dari 1.800 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah disiapkan.

Secara umum, proses pelaksanaan pemilu di Kota Banjarmasin berjalan dengan lancar dan kondusif. Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam pemenuhan hak pilih bagi penduduk non-

¹ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, "Kota Banjarmasin Dalam Angka 2023," accessed April 15, 2025,

permanen atau pendatang dari luar daerah, seperti mahasiswa dan pekerja sementara. Kelompok ini diwajibkan untuk mengurus administrasi pindah memilih agar dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kota Banjarmasin tergolong cukup tinggi. Data resmi dari KPU Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa sekitar 384.000 pemilih menggunakan hak pilihnya, atau setara dengan kurang lebih 77% dari total DPT. Hal ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi, meskipun masih terdapat kendala teknis dan administratif yang dihadapi oleh beberapa kelompok, khususnya pemilih pemula dan pendatang.²

2. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

a. Gambaran Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan independen. Dalam pelaksanaannya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat masing-masing wilayah. KPU memiliki kewenangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjalankan tugasnya secara berkelanjutan tanpa campur tangan pihak mana pun.

² Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. (2024). *Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2024*. KPU Kota Banjarmasin.

KPU berkedudukan di ibu kota negara, sedangkan KPU Provinsi berada di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Dalam menjalankan tugasnya, KPU pusat didukung oleh Sekretariat Jenderal, sementara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga dibantu oleh sekretariat masing-masing.

Jumlah anggota KPU pusat terdiri dari tujuh orang, sedangkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing beranggotakan lima orang. Setiap tingkat KPU dipimpin oleh seorang ketua yang merangkap sebagai anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota. Seluruh anggota memiliki hak suara yang sama. Selain itu, komposisi keanggotaan KPU di setiap tingkatan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Masa jabatan anggota KPU adalah lima tahun sejak dilantik.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU melaksanakan tugasnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

b. Visi Misi

- 1) Visi: Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terwujudnya Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL di Kota Banjarmasin.

2) Misi:

- a) Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- b) Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- c) Meningkatkan kesadaran politik rakyat, partisipasi dan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.³

c. Struktur Organisasi

STRUKTUR ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

KOTA BANJARMASIN PERIODE 2023 – 2028

Tabel 4 1 Struktur Anggota Komisis Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

NO	Nama	Jabatan	KET
1	Dra. Hj. Rusnailah, M.Pd	Ketua KPU Kota Banjarmasin.	
2	Subhani, S.E.I	Anggota KPU Kota Banjarmasin.	
3	Hafizah Wahid, S.E.I	Anggota KPU Kota Banjarmasin.	
4	Azhari Fadli, S.Pd.I	Anggota KPU Kota Banjarmasin.	

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANJARMASIN

Tabel 4 2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Banjarmasin

NO	Nama	Jabatan	KET
1	Muhammad Jazuli, SE	Sekretaris KPU Kota Banjarmasin	
2	Roby Marendra, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
3	Novita Febriyanti, SH, M.Kn, M.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	
4	Muliadi Rahman, SE, MH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	

³ “KPU KOTA-BANJARMASIN,” accessed 15 April, 2026, <https://kotabanjarmasin.kpu.go.id/page/read/visi-misi>.

		Partisipasi Hubungan Masyarakat	
5	Noor Fitria Sari, S. Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
6	Ahmad Mufassirin Yamashida, SE	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dan pemegang data DPTb Kota Banjarmasin.	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

B. Penyajian Data

Dalam laporan hasil penelitian ini, peneliti akan menyajikan hasil yang diperoleh dari wawancara langsung dengan berbagai pihak, yaitu Anggota KPU Kota Banjarmasin, dan para Mahasiswa di Kota Banjarmasin yang memilih yang terdaftar dan tidak terdaftar sebagai DPTb di Kota Banjarmasin pada Pemilu tahun 2024 sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan Pertama

Nama : Azhari Fadli, S.Pd.I., M.I.Kom.

Pendidikan : S2 Komunikasi

Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Banjarmasin (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM)

Alamat : Jl. Setia RT 36 No. 29 Pemurus Dalam Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KPU Kota Banjarmasin yaitu dengan Bapa Azhari Fadli , diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat, khususnya mahasiswa, pada Pemilu 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya semakin tinggi. Banyak pemilih mulai tertarik dengan calon yang mereka anggap bisa mewakili aspirasi mereka. Selain itu, media sosial juga sangat berpengaruh dalam mendorong masyarakat, terutama anak muda, untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa sebagai pemilih pemula, KPU Kota Banjarmasin melakukan beberapa strategi. Pertama, KPU memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi tentang pemilu, seperti pentingnya memilih, cara memilih, serta informasi terkait pemilu itu sendiri. Hal ini dilakukan karena mahasiswa saat ini sangat aktif menggunakan media sosial.

Kedua, KPU juga melakukan sosialisasi langsung ke kampus melalui program yang disebut “KPU Goes to Campus”. Melalui program ini, KPU datang langsung ke kampus untuk memberikan penjelasan tentang pemilu sekaligus membuka sesi tanya jawab dengan mahasiswa. Cara ini dinilai efektif karena mahasiswa bisa langsung bertanya dan mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dibanding hanya melihat informasi di media sosial. Terkait kerja sama dengan kampus, KPU Kota Banjarmasin memang sudah melakukan kerja sama, tetapi

masih bersifat terbatas (parsial). Beberapa kampus seperti ULM, UIN Antasari, dan UNISKA pernah menjadi tempat sosialisasi KPU. Biasanya, kegiatan ini dilakukan jika pihak kampus memberikan kesempatan kepada KPU untuk masuk dan memberikan edukasi kepada mahasiswa. Dari sisi efektivitas, KPU menilai bahwa program sosialisasi ini cukup berhasil. Mahasiswa yang awalnya kurang peduli atau bahkan apatis terhadap politik, setelah mendapatkan penjelasan langsung menjadi lebih paham dan mulai sadar bahwa suara mereka itu penting. Selain itu, kehadiran KPU secara langsung juga membantu meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap proses pemilu yang dianggap transparan dan jujur.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan waktu dan jangkauan, sehingga KPU belum bisa mendatangi semua kampus yang ada di Banjarmasin. Selain itu, masih ada mahasiswa yang menganggap politik itu tidak penting atau hanya sebatas perebutan kekuasaan, sehingga mereka kurang tertarik untuk ikut berpartisipasi. Kendala lainnya adalah dari sisi media sosial. Tidak semua mahasiswa melihat atau memperhatikan informasi yang dibagikan oleh KPU. Mereka cenderung lebih tertarik pada konten dari influencer atau artis, sehingga informasi penting tentang pemilu kadang tidak tersampaikan dengan maksimal.

Selain itu, ada juga kendala administratif, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Banyak mahasiswa yang tidak

bisa memilih di tempat mereka kuliah karena belum mengurus pindah memilih. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya informasi atau karena mereka terlambat mengurus administrasi. Akibatnya, mereka harus pulang ke daerah asal untuk memilih atau bahkan tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU memberikan solusi dengan memperbolehkan pemilih menggunakan KTP pada hari pemungutan suara, biasanya setelah pukul 12.00, selama masih ada sisa surat suara di TPS. Namun, dalam kondisi ini, pemilih biasanya hanya bisa memilih Presiden dan DPD, tidak bisa memilih DPR atau DPRD karena perbedaan daerah pemilihan.

Secara keseluruhan, upaya KPU Kota Banjarmasin dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa pada Pemilu 2024 sudah cukup baik dan menunjukkan hasil yang positif. Meskipun begitu, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam memperluas sosialisasi, meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya politik, serta mempermudah proses administrasi bagi mahasiswa perantau.⁴

⁴ Azhari Fadli. Anggota KPU Kota Banjarmasin Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM, *Wawancara Pribadi, Kantor KPU Kota Banjarmasin*, 8 April 2026, 13.09 WITA.

b. Informan kedua

Nama : Muhammad Rijal

Pendidikan : UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Perbandingan Mazhab

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat Asal : Jl. RA. Kartini, Kecamatan. Dusun Selatan, Kabupaten. Barito Selatan. Provinsi. Kalimantan Tengah

Alamat Domisili : Jl. Buncit Indah I , Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249

Berdasarkan Hasil Wawancara menurut Rijal, Pemilu 2024 merupakan momentum yang sangat penting karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin serta arah kebijakan negara ke depan. Ia menyadari bahwa sebagai mahasiswa, ada tanggung jawab moral untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, mengingat mahasiswa sering dianggap sebagai kelompok intelektual yang memiliki pemahaman lebih terhadap isu sosial dan politik. Selain itu, keputusan politik yang diambil dalam pemilu juga akan berdampak langsung terhadap masa depan generasi muda.

Namun demikian, pada pelaksanaan Pemilu 2024, Rijal tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini bukan disebabkan oleh sikap apatis, melainkan karena adanya kendala administratif. Statusnya sebagai

mahasiswa perantau menjadi faktor utama, di mana data pemilihnya masih terdaftar di daerah asal, yaitu Buntok, sementara pada hari pemungutan suara ia berada di Banjarmasin. Untuk dapat memilih di tempat domisilinya saat ini, ia harus melakukan proses pindah memilih.

Rijal mengaku sebenarnya memiliki niat untuk mengurus pindah memilih, tetapi ia menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya informasi yang jelas terkait prosedur pindah memilih, mulai dari persyaratan, alur pengurusan, hingga batas waktu pendaftaran. Ia menilai bahwa sosialisasi mengenai hal tersebut masih belum maksimal, khususnya di lingkungan kampus.

Selain itu, faktor kesibukan juga menjadi penghambat. Aktivitas perkuliahan, tugas, dan kegiatan lainnya membuatnya kesulitan untuk meluangkan waktu dalam mencari informasi tambahan maupun mengurus dokumen yang diperlukan. Ketika informasi yang tersedia tidak jelas, mahasiswa harus berinisiatif mencari sendiri, yang tentu membutuhkan waktu dan usaha lebih.

Akibat dari kombinasi antara minimnya informasi, prosedur yang dirasa cukup rumit, serta keterbatasan waktu, Rijal akhirnya tidak sempat menyelesaikan proses pindah memilih hingga batas waktu yang ditentukan. Hal tersebut menyebabkan ia tidak dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara.

Fenomena ini tidak hanya dialami oleh Rijal secara individu. Ia juga menemukan bahwa beberapa mahasiswa rantau lainnya

mengalami kendala serupa. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa perantau bukan semata-mata karena faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sistem, terutama dalam hal sosialisasi dan kemudahan akses prosedur administratif.

Secara umum, Rijal menilai bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 sudah berjalan dengan baik. Namun, bagi pemilih perantau seperti mahasiswa, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Masih adanya mahasiswa yang ingin berpartisipasi tetapi terhambat oleh kendala teknis menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kelompok pemilih.

Sebagai harapan ke depan, Rijal menyarankan agar sosialisasi terkait pemilu, khususnya mengenai mekanisme pindah memilih, dapat dilakukan secara lebih aktif dan menyasar langsung ke mahasiswa, misalnya melalui kerja sama dengan pihak kampus atau melalui media sosial. Selain itu, proses pindah memilih diharapkan dapat dibuat lebih sederhana dan praktis, termasuk dengan memanfaatkan sistem berbasis Online yang mudah diakses dan dipahami. Ia juga menekankan pentingnya peran kampus dalam memberikan edukasi politik serta menjembatani kerja sama dengan pihak penyelenggara pemilu. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan mahasiswa rantau tidak lagi

kehilangan hak pilihnya hanya karena kendala administratif dan keterbatasan informasi.⁵

c. Informan ketiga

Nama : Muhamad Abdul Qomaruddin
 Pendidikan : UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum
 Keluarga Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Asal : Desa Sei liju, Kecamatan Teweh Timur,
 Kabupaten Barito Utara
 Alamat Domisili : Jl. Veteran Komplek halim, Jalur 3 No. 52
 Rt.24 Kelurahan Kuripan, Kecamatan
 Banjarmasin Timur

Berdasarkan hasil wawancara Qomar, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam di UIN Antasari Banjarmasin. Ia berasal dari Muara Teweh, Kalimantan Tengah, dan saat ini menjalani kehidupan sebagai mahasiswa rantau di Banjarmasin.

Menurut Qomar, Pemilu 2024 merupakan hal yang sangat penting karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin serta arah kebijakan negara ke depan. Ia berpendapat bahwa mahasiswa tidak hanya memiliki hak pilih, tetapi juga tanggung jawab

⁵ Muhammad Rijal. Pemilih tetapi tidak melakukan Pindah memilih Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi, di Cafe Salbi Gatot Subroto Banjarmasin*, 15 April 2026 , 17.30 WITA.

moral untuk berpartisipasi, mengingat mahasiswa dianggap sebagai kelompok yang lebih kritis dan paham terhadap isu-isu sosial maupun politik. Pada pelaksanaan Pemilu 2024, Qomar tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga terlibat langsung sebagai PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara). Sebagai mahasiswa rantau, ia harus mengurus proses pindah memilih dari daerah asalnya di Muara Teweh ke Banjarmasin agar tetap dapat menyalurkan hak pilihnya.

Ia mengakui bahwa pada awalnya proses pindah memilih terasa cukup rumit. Terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi serta alur pengurusan yang perlu dipahami dengan baik. Namun, karena adanya tanggung jawab sebagai PTPS, Qomar terdorong untuk lebih aktif mencari informasi. Ia memperoleh informasi melalui berbagai sumber, seperti internet, teman, serta pihak penyelenggara pemilu. Setelah melalui proses tersebut, Qomar menilai bahwa mekanisme pindah memilih sebenarnya dapat diikuti, meskipun memang membutuhkan inisiatif dan usaha dari individu. Ia harus mengurus surat pindah memilih serta memastikan bahwa namanya telah terdaftar dalam daftar pemilih di lokasi baru. Pada akhirnya, ia berhasil menyelesaikan proses tersebut dan dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara di Banjarmasin.

Pengalaman sebagai PTPS juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi Qomar mengenai proses pelaksanaan pemilu. Ia dapat melihat secara langsung tahapan yang berlangsung di Tempat

Pemungutan Suara (TPS), mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini membuatnya semakin menyadari pentingnya menjaga kejujuran dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Selain berpartisipasi secara langsung dalam pemungutan suara dan pengawasan, Qomar juga terlibat dalam diskusi-diskusi ringan bersama teman terkait isu politik, meskipun tidak dilakukan secara intens. Ia menilai bahwa sosialisasi pemilu di lingkungan kampus masih belum optimal, sehingga banyak mahasiswa yang harus mencari informasi secara mandiri.

Faktor utama yang mendorong partisipasi Qomar adalah adanya tanggung jawab sebagai PTPS serta kesadaran pribadi akan pentingnya suara individu dalam pemilu. Selain itu, lingkungan pertemanan yang memiliki kepedulian terhadap isu politik juga turut memengaruhi tingkat partisipasinya. Adapun kendala yang dihadapi lebih banyak terjadi pada tahap awal, terutama terkait kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur pindah memilih serta aspek administratif yang dirasa cukup membingungkan. Qomar juga mengamati bahwa banyak mahasiswa lain yang sebenarnya ingin berpartisipasi, namun mengurungkan niatnya karena merasa proses tersebut rumit.

Menurutnya, rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pemilu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi, khususnya bagi mahasiswa rantau, serta anggapan bahwa politik merupakan hal yang rumit dan kurang menarik. Secara umum, Qomar

menilai bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 sudah berjalan dengan cukup baik, terutama dari sisi teknis di lapangan. Namun demikian, ia menekankan bahwa aspek penyebaran informasi masih perlu ditingkatkan, khususnya untuk menjangkau kalangan mahasiswa. Qomar juga berpendapat bahwa suara mahasiswa tetap memiliki pengaruh, meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Ia meyakini bahwa jika partisipasi mahasiswa meningkat secara kolektif, maka dampaknya terhadap hasil pemilu juga akan signifikan.

Sebagai harapan ke depan, Qomar menginginkan adanya peningkatan sosialisasi terkait pemilu, terutama mengenai mekanisme pindah memilih, yang dilakukan secara lebih intensif dan langsung menasar lingkungan kampus. Selain itu, ia juga berharap agar proses administratif dapat disederhanakan dan lebih mudah diakses, misalnya melalui sistem berbasis Online yang lebih praktis. Dengan demikian, mahasiswa rantau dapat tetap menggunakan hak pilihnya tanpa mengalami kendala yang berarti.⁶

⁶ Muhamad Abdul Qomaruddin. Pemilih melakukan Pindah memilih Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi, di Warung Kopi Pramuka Banjarmasin*, 16 April 2026 , 19.30 WITA.

d. Informan Keempat

Nama : Mujainah
Pendidikan : UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum
Keluarga Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Asal : Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi
Kalimantan Selatan
Alamat Domisili : Jl. Manunggal, Kebun Bunga, Kec.
Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,

Berdasarkan hasil wawancara ini adalah Mujainah, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam di UIN Antasari Banjarmasin. Ia berasal dari Tanjung, Kalimantan Selatan, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Banjarmasin sebagai mahasiswi rantau. Menurut Mujainah, Pemilu 2024 merupakan momen yang sangat penting karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin serta arah kebijakan negara ke depan. Ia juga menyadari bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam proses demokrasi, karena umumnya mahasiswa dianggap lebih kritis dan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap isu-isu sosial dan politik. Namun demikian, pada pelaksanaan Pemilu 2024, Mujainah tidak menggunakan hak pilihnya. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh sikap tidak peduli, melainkan karena kurangnya

informasi yang ia peroleh terkait mekanisme pemilu, khususnya mengenai prosedur pindah memilih.

Pada saat pemilu berlangsung, posisi Mujainah berada di Banjarmasin, sementara data pemilihnya masih terdaftar di daerah asalnya, yaitu Tanjung. Secara administratif, ia sebenarnya memiliki kesempatan untuk tetap memilih dengan cara mengurus pindah memilih. Akan tetapi, ia mengaku tidak mengetahui adanya prosedur tersebut. Ia juga tidak mendapatkan sosialisasi yang memadai, baik dari lingkungan kampus, media sosial, maupun lingkungan sekitarnya.

Kondisi tersebut membuat Mujainah beranggapan bahwa satu-satunya cara untuk menggunakan hak pilih adalah dengan kembali ke daerah asal. Karena situasi tidak memungkinkan untuk pulang, akhirnya ia memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara. Kurangnya informasi juga berdampak pada rendahnya inisiatif untuk mencari tahu lebih lanjut. Mujainah menyatakan bahwa apabila sejak awal terdapat informasi yang jelas dan mudah dipahami, kemungkinan besar ia akan berusaha mengurus pindah memilih. Namun karena minimnya akses informasi yang ia terima, kesempatan tersebut akhirnya terlewatkan.

Fenomena ini tidak hanya dialami oleh Mujainah secara individu. Ia juga mengamati bahwa cukup banyak mahasiswa rantau lain yang mengalami hal serupa. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut bersifat lebih luas dan berkaitan dengan kurang

optimalnya penyebaran informasi kepada kelompok mahasiswa. Menurut Mujainah, salah satu faktor utama rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pemilu adalah kurangnya sosialisasi, terutama terkait hal-hal teknis seperti prosedur pindah memilih. Banyak mahasiswa yang sebenarnya memiliki keinginan untuk berpartisipasi, namun tidak mengetahui cara atau mekanisme yang harus ditempuh.

Secara umum, Mujainah menilai bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan dengan baik. Namun, dari sisi akses informasi, khususnya bagi kalangan mahasiswa, masih perlu ditingkatkan agar lebih merata dan mudah dijangkau. Ia juga meyakini bahwa suara mahasiswa memiliki peran penting dalam demokrasi. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak mahasiswa yang belum dapat menyalurkan hak pilihnya akibat kendala informasi dan administratif.

Sebagai harapan ke depan, Mujainah menginginkan agar sosialisasi mengenai pemilu dapat dilakukan secara lebih aktif dan menyasar langsung kepada mahasiswa, misalnya melalui kerja sama dengan pihak kampus atau melalui media sosial yang sering digunakan oleh mahasiswa. Selain itu, informasi yang disampaikan diharapkan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Ia juga berharap adanya sistem yang lebih praktis dalam proses pindah memilih, sehingga mahasiswa rantau tidak lagi mengalami kebingungan dalam mengurus hak pilihnya. Dengan demikian, ke

depannya diharapkan tidak ada lagi mahasiswa yang kehilangan hak pilih hanya karena keterbatasan informasi.⁷

e. Informan kelima

Nama : Abdul Rasyid
Pendidikan : Universitas Lambung Mangkurat, Jurusan Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Asal : Ampah, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Domisili : Antasan Kecil Tim., Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara Narasumber dalam wawancara ini adalah Abdul Rasyid, mahasiswa jurusan Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Ia berasal dari Ampah, Kalimantan Tengah, dan saat ini menjalani pendidikan di Banjarmasin sebagai mahasiswa rantau. Menurut Abdul Rasyid, Pemilu 2024 merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin serta arah kebijakan negara ke depan. Ia berpendapat bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam proses demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai agen perubahan yang diharapkan memiliki kepedulian terhadap kondisi politik.

⁷ Mujainah. Pemilih tidak melakukan Pindah memilih Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi, di Warung Kopi Kayutangi Banjarmasin*, 10 Mei 2026 , 12.15 WITA.

Pada pelaksanaan Pemilu 2024, Abdul Rasyid menggunakan hak pilihnya. Sebagai mahasiswa rantau, ia harus mengurus pindah memilih dari daerah asalnya di Ampah ke Banjarmasin. Ia mengaku bahwa pemahamannya terkait prosedur pindah memilih diperoleh melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya, sosialisasi tersebut memberikan penjelasan yang cukup jelas, mulai dari pengertian pindah memilih, kriteria pemilih yang dapat mengajukan, persyaratan administrasi, hingga alur pengurusannya. Informasi yang disampaikan dinilai sangat membantu, terutama bagi mahasiswa rantau yang sebelumnya belum memahami prosedur tersebut.

Setelah mengikuti sosialisasi, Abdul Rasyid menjadi lebih yakin untuk mengurus pindah memilih. Meskipun terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, seperti melengkapi berkas dan mendatangi lokasi yang telah ditentukan, proses tersebut terasa lebih mudah karena ia telah memahami alurnya dengan baik. Ia juga menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi mahasiswa. Penyampaian informasi yang jelas dan langsung menyoal kelompok mahasiswa dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman serta mendorong partisipasi.

Selain berpartisipasi dalam pemungutan suara, Abdul Rasyid juga terlibat dalam diskusi-diskusi ringan bersama teman terkait isu pemilu, meskipun tidak dilakukan secara intens. Ia menilai bahwa

lingkungan pertemanan di kampus cukup mendukung, karena adanya saling berbagi informasi dan kepedulian terhadap isu politik.

Faktor utama yang mendorong partisipasinya adalah adanya akses informasi yang jelas melalui sosialisasi KPU, ditambah dengan kesadaran pribadi akan pentingnya suara dalam pemilu. Dukungan dari lingkungan sekitar juga turut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasinya. Adapun kendala yang dihadapi relatif tidak signifikan, karena telah teratasi melalui informasi yang diperoleh dari sosialisasi. Namun, ia mengamati bahwa mahasiswa yang tidak mengikuti sosialisasi cenderung mengalami kebingungan terkait prosedur pindah memilih.

Menurut Abdul Rasyid, salah satu penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa adalah kurangnya sosialisasi. Namun, apabila sosialisasi dilakukan secara optimal dan tepat sasaran, hal tersebut justru dapat meningkatkan tingkat partisipasi mahasiswa dalam pemilu. Secara umum, ia menilai bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan dengan cukup baik, terutama dari sisi teknis. Ia juga meyakini bahwa suara mahasiswa tetap memiliki pengaruh dalam proses demokrasi.

Sebagai harapan ke depan, Abdul Rasyid menginginkan agar sosialisasi dari KPU dapat dilakukan lebih intensif dan menjangkau lebih banyak mahasiswa, baik melalui kerja sama dengan pihak kampus maupun melalui media sosial. Ia menekankan bahwa ketika informasi

dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, maka mahasiswa akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam pemilu.⁸

f. Informan Keenam

Nama : Regina Yulia Rakhmah
 Pendidikan : Universitas Lambung Mangkurat, Jurusan Bahasa Inggris
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Asal : Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan
 Alamat Domisili : Jl. Kayu Tangi, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,

Berdasarkan hasil wawancara Menurut Regina, Pemilu 2024 merupakan hal yang sangat penting karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin serta arah kebijakan negara ke depan. Ia juga berpendapat bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam demokrasi karena umumnya mahasiswa lebih kritis dan memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial maupun politik yang sedang berkembang.

Namun demikian, pada pelaksanaan Pemilu 2024, Regina tidak menggunakan hak pilihnya. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan

⁸ Abdul Rasyid. Pemilih melakukan Pindah memilih Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi, di Warung Kopi Kayutangi Banjarmasin*, 10 Mei 2026 , 19.45 WITA.

karena sikap tidak peduli atau enggan mengikuti pemilu, melainkan karena kurangnya informasi mengenai prosedur pindah memilih. Pada saat pemilu berlangsung, Regina berada di Banjarmasin untuk kuliah, sementara data pemilihnya masih terdaftar di daerah asalnya, yaitu Amuntai.

Regina mengaku bahwa pada awalnya ia beranggapan bahwa untuk dapat memilih, dirinya harus kembali ke daerah asal. Sementara itu, kondisi perkuliahan dan berbagai aktivitas lainnya membuatnya tidak memungkinkan untuk pulang ke Amuntai pada saat pemungutan suara berlangsung. Ia juga tidak mengetahui bahwa mahasiswa rantau sebenarnya dapat mengurus pindah memilih agar tetap bisa menggunakan hak pilih di daerah tempat tinggal sementara.

Menurut Regina, informasi mengenai pindah memilih masih kurang tersebar luas, khususnya di lingkungan mahasiswa. Ia jarang menemukan sosialisasi yang secara jelas menjelaskan prosedur pindah memilih, mulai dari persyaratan, tempat pengurusan, hingga batas waktu pengajuan. Akibat minimnya informasi tersebut, ia menjadi kurang memahami mekanisme yang harus dilakukan. Karena keterbatasan informasi yang diperoleh, Regina juga tidak memiliki inisiatif untuk mengurus pindah memilih. Ia justru baru mengetahui lebih rinci mengenai prosedur tersebut setelah pemilu selesai, melalui cerita beberapa temannya yang berhasil melakukan pindah memilih.

Dalam bentuk partisipasi lainnya, Regina mengaku hanya terlibat dalam diskusi-diskusi ringan bersama teman mengenai calon maupun isu politik yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Ia tidak terlibat dalam kegiatan kampanye maupun organisasi politik tertentu. Menurutnya, lingkungan kampus turut memengaruhi cara pandang mahasiswa terhadap politik. Adanya diskusi dan teman-teman yang aktif membahas isu politik membuat mahasiswa menjadi lebih sadar dan peduli terhadap perkembangan politik. Selain itu, media sosial juga menjadi salah satu sumber utama informasi yang ia peroleh terkait pemilu.

Regina menilai bahwa hambatan terbesar yang ia alami adalah kurangnya informasi serta kendala administratif. Ketidaktahuannya mengenai mekanisme pindah memilih menyebabkan dirinya kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2024. Ia juga berpendapat bahwa rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pemilu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti anggapan bahwa politik merupakan hal yang rumit atau kurang penting. Selain itu, mahasiswa rantau juga sering menghadapi kendala administratif dan kurangnya sosialisasi terkait prosedur pemilu. Secara umum, Regina menilai bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi, dari sisi penyebaran informasi kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa perantau, menurutnya masih belum maksimal. Meskipun demikian, Regina tetap percaya bahwa suara mahasiswa

memiliki pengaruh dalam demokrasi. Menurutnya, mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda memiliki jumlah yang besar dan potensi untuk membawa perubahan dalam kehidupan politik. Sebagai harapan ke depan, Regina menginginkan agar sosialisasi terkait pemilu, terutama mengenai pindah memilih, dapat dilakukan secara lebih aktif dan jelas. Ia menyarankan agar sosialisasi dilakukan melalui seminar kampus, media sosial, maupun kerja sama langsung dengan pihak kampus agar mahasiswa lebih mudah memperoleh informasi. Selain itu, Regina juga berharap proses pindah memilih dapat dibuat lebih praktis dan mudah dipahami, sehingga mahasiswa rantau tidak lagi mengalami kebingungan dan tetap dapat berpartisipasi dalam pemilu berikutnya.⁹

g. Informan Ketujuh

Nama : Hamidatul Hasanah
Pendidikan : Universitas Lambung Mangkurat, Jurusan
Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Asal : Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Domisili : Sungai Andai, Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin

⁹ Regina Yulia Rakhmah. Pemilih Tidak melakukan Pindah memilih Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi, Kopi Mae Banjarmasin*, 12 Mei 2026 , 20.00 WITA.

Berdasarkan hasil Narasumber dalam wawancara ini adalah Mida, mahasiswi jurusan Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Ia berasal dari Amuntai, Kalimantan Selatan, dan saat ini tinggal di Banjarmasin untuk menempuh pendidikan sebagai mahasiswi rantau. Menurut Mida, Pemilu 2024 merupakan momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin serta arah kebijakan negara ke depan. Ia berpendapat bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam demokrasi karena umumnya mahasiswa lebih kritis dan memiliki pandangan terhadap berbagai isu sosial maupun politik.

Namun demikian, pada pelaksanaan Pemilu 2024, Mida tidak menggunakan hak pilihnya. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh sikap tidak peduli terhadap politik atau rasa malas untuk ikut pemilu, melainkan karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pindah memilih. Pada saat itu, Mida masih termasuk pemilih pemula sehingga pemahamannya mengenai teknis pelaksanaan pemilu masih sangat terbatas.

Ketika pemilu berlangsung, Mida berada di Banjarmasin untuk menjalani perkuliahan, sementara data pemilihnya masih terdaftar di daerah asalnya, yaitu Amuntai. Ia mengaku beranggapan bahwa untuk dapat menggunakan hak pilih, dirinya harus kembali ke daerah asal. Akan tetapi, kondisi perkuliahan dan berbagai kesibukan lainnya membuatnya tidak dapat pulang pada saat pemungutan suara berlangsung.

Mida juga mengaku tidak mengetahui bahwa mahasiswa rantau sebenarnya dapat mengurus pindah memilih agar tetap dapat memberikan suara di tempat domisili sementara. Ia tidak pernah memperoleh informasi yang jelas terkait hal tersebut, baik melalui media sosial, lingkungan sekitar, maupun dari pihak kampus. Sebagai pemilih pemula, Mida merasa masih kurang memahami prosedur pemilu sehingga ia tidak terpikir untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pindah memilih. Ia baru mengetahui adanya prosedur tersebut setelah pemilu selesai, ketika berbincang dengan beberapa temannya yang ternyata berhasil melakukan pindah memilih.

Dalam bentuk partisipasi politik lainnya, Mida mengaku hanya mengikuti diskusi-diskusi ringan bersama teman mengenai calon presiden, isu politik yang sedang ramai, maupun informasi yang beredar di media sosial. Ia tidak terlibat dalam kegiatan kampanye ataupun organisasi politik tertentu. Menurutnya, lingkungan kampus cukup berpengaruh dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa. Adanya diskusi dan sosialisasi mengenai politik dapat membuat mahasiswa menjadi lebih sadar dan peduli terhadap isu demokrasi. Akan tetapi, ia menilai bahwa sosialisasi mengenai teknis pemilu, khususnya terkait pindah memilih bagi mahasiswa rantau dan pemilih pemula, masih kurang optimal.

Mida juga menyebutkan bahwa keluarga dan lingkungan pertemanan turut memberikan pengaruh terhadap pandangannya

mengenai pemilu. Orang tuanya menyarankan agar ia ikut memilih karena hal tersebut merupakan hak sebagai warga negara. Sementara itu, teman-temannya juga sering membahas pemilu, meskipun sebagian besar sama-sama kurang memahami prosedur pindah memilih. Hambatan terbesar yang dialaminya adalah kurangnya informasi dan pengetahuan sebagai pemilih pemula. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa ke tidak ikut sertaannya dalam pemilu bukan karena tidak ingin berpartisipasi, melainkan karena tidak mengetahui prosedur yang harus dilakukan.

Menurut Mida, kondisi tersebut juga menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pemilu, khususnya bagi mahasiswa rantau dan pemilih pemula. Banyak mahasiswa yang sebenarnya ingin ikut memilih, tetapi mengalami kebingungan terkait prosedur dan administrasi pemilu. Secara umum, Mida menilai bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan dengan cukup baik. Namun, dari sisi penyebaran informasi kepada mahasiswa dan pemilih pemula, menurutnya masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah dipahami dan menjangkau lebih banyak kalangan muda.

Ia juga percaya bahwa suara mahasiswa dan generasi muda memiliki pengaruh penting dalam demokrasi, mengingat jumlah pemilih muda yang cukup besar dan potensinya dalam memengaruhi hasil pemilu. Sebagai harapan ke depan, Mida menginginkan agar sosialisasi mengenai pemilu dapat dilakukan secara lebih aktif dan

menggunakan cara yang lebih mudah dipahami oleh pemilih pemula. Menurutnya, sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, seminar kampus, maupun konten-konten yang lebih dekat dengan anak muda. Selain itu, ia juga berharap informasi mengenai pindah memilih dapat disampaikan dengan lebih jelas dan lebih sering kepada mahasiswa rantau. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi mahasiswa yang kehilangan hak pilih hanya karena kurangnya informasi, seperti yang ia alami pada Pemilu 2024.¹⁰

h. Informan kedelapan

Nama : Muhammad Riyan Maulana
Pendidikan : Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al Banjari Jurusan Teknik Informatika
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Asal : Ampah , Kabupaten Barito Selatan, Provinsi
Kalimantan Selatan
Alamat Domisili : Jl. Karya Sabumi V 32,Pangeran, Kec.
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,

¹⁰ Hamidatul Hasanah. Pemilih Tidak melakukan Pindah memilih Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi, Kopi Mae Banjarmasin*, 12 Mei 2026 , 20.15 WITA.

Berdasarkan hasil Wawancara Narasumber Menurut Iyan, Pemilu 2024 merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara ke depan. Ia berpendapat bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam demokrasi karena mahasiswa umumnya lebih kritis dan lebih peka terhadap berbagai isu sosial maupun politik. Namun demikian, pada pelaksanaan Pemilu 2024, Iyan tidak menggunakan hak pilihnya. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh sikap tidak peduli ataupun rasa malas untuk mengikuti pemilu, melainkan karena dirinya tidak melakukan proses pindah memilih. Pada saat pemilu berlangsung, Iyan berada di Banjarmasin untuk kuliah, sementara data pemilihnya masih terdaftar di daerah asalnya, yaitu Ampah, Kalimantan Tengah.

Iyan mengaku sebenarnya memiliki keinginan untuk ikut memilih, tetapi ia kurang memahami mekanisme pindah memilih. Ia hanya pernah mendengar sekilas mengenai prosedur tersebut, namun tidak benar-benar mengetahui bahwa mahasiswa rantau dapat mengajukan pindah TPS agar tetap bisa menggunakan hak pilih di tempat domisili sementara. Selain itu, ia juga merasa kurang memahami prosedur administrasi yang harus dilakukan. Ia mengaku bingung mengenai tahapan pengurusan, persyaratan yang diperlukan, tempat pengajuan, hingga batas waktu pengurusannya. Informasi yang

diperolehnya juga dirasa kurang jelas sehingga membuatnya semakin kesulitan memahami proses pindah memilih.

Akibat kurangnya pemahaman tersebut, Iyan akhirnya tidak sempat mengurus pindah memilih hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan dirinya tidak dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Iyan juga mengamati bahwa banyak mahasiswa rantau lain mengalami kendala serupa. Menurutnya, terdapat mahasiswa yang mengetahui adanya pindah memilih tetapi tidak memahami prosedurnya, dan ada pula yang sama sekali tidak mengetahui bahwa pindah memilih dapat dilakukan.

Ia menilai bahwa kurangnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama permasalahan tersebut. Kesibukan mahasiswa dalam menjalani aktivitas perkuliahan membuat sebagian mahasiswa tidak terlalu mengikuti informasi politik secara detail. Selain itu, meskipun informasi tersedia, penyampaiannya dianggap kurang jelas dan belum sepenuhnya menjangkau kalangan mahasiswa. Dalam bentuk partisipasi politik lainnya, Iyan mengaku hanya mengikuti diskusi-diskusi ringan bersama teman mengenai calon presiden, isu politik yang sedang ramai, maupun perkembangan pemilu melalui media sosial. Ia tidak terlibat dalam kegiatan kampanye maupun organisasi politik tertentu.

Menurutnya, lingkungan kampus dan media sosial memiliki pengaruh terhadap cara mahasiswa memandang politik. Apabila

terdapat diskusi ataupun sosialisasi yang aktif, mahasiswa biasanya menjadi lebih peduli dan lebih memahami persoalan pemilu.

Hambatan terbesar yang ia alami adalah kurangnya informasi dan minimnya pemahaman mengenai prosedur pindah memilih. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa sebenarnya ia memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu, namun kebingungan terkait administrasi membuatnya akhirnya tidak ikut memilih. Menurut Iyan, rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pemilu juga dipengaruhi oleh banyaknya mahasiswa rantau yang mengalami kendala serupa. Selain itu, masih ada mahasiswa yang menganggap politik sebagai sesuatu yang rumit atau kurang penting karena minimnya edukasi politik.

Secara umum, Iyan menilai bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi, dari sisi penyebaran informasi kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa rantau, menurutnya masih perlu ditingkatkan. Ia juga percaya bahwa suara mahasiswa memiliki peran penting dalam demokrasi karena mahasiswa dan generasi muda merupakan kelompok pemilih dengan jumlah besar yang dapat membawa perubahan apabila berpartisipasi secara aktif.

Sebagai harapan ke depan, Iyan menginginkan agar sosialisasi mengenai pemilu, khususnya terkait pindah memilih, dapat dilakukan secara lebih aktif dan jelas. Menurutnya, sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar kampus, media sosial, maupun kerja sama langsung dengan pihak kampus agar mahasiswa lebih mudah memahami

prosedur yang ada. Selain itu, ia juga berharap proses pindah memilih dapat dibuat lebih sederhana dan praktis sehingga mahasiswa rantau tidak lagi mengalami kebingungan dalam mengurus hak pilihnya. Dengan demikian, ke depannya diharapkan tidak ada lagi mahasiswa yang kehilangan hak pilih hanya karena kurangnya informasi dan pemahaman mengenai prosedur pemilu.¹¹

i. Informan kesembilan

Nama : Daffa Andika
 Pendidikan : Universitas Islam Kalimantan Muhammad
 Arsyad Al Banjari Jurusan Pendidikan
 Olahraga
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Asal : Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kabupaten
 Paser, Kalimantan Timur
 Alamat Domisili : Antasan Kecil Tim., Kec. Banjarmasin Utara,
 Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil Wawancara Narasumber dalam wawancara ini adalah Daffa, mahasiswa jurusan Pendidikan Olahraga di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Ia berasal dari Ampah, Kalimantan Tengah, dan saat ini tinggal di Banjarmasin untuk menempuh pendidikan sebagai mahasiswa rantau.

¹¹ Ahmad Riyan Maulana. Pemilih Tidak melakukan Pindah memilih Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi, Toko Kopi Dua Asa Banjarmasin*, 11 Mei 2026 , 17.20 WITA.

Menurut Daffa, Pemilu 2024 merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara ke depan. Ia berpendapat bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam demokrasi karena mahasiswa dan generasi muda merupakan kelompok pemilih dengan jumlah yang besar serta cenderung lebih kritis terhadap berbagai isu sosial maupun politik. Pada pelaksanaan Pemilu 2024, Daffa menggunakan hak pilihnya dengan cara melakukan pindah memilih dari daerah asalnya di Ampah ke Banjarmasin. Ia mengaku bahwa pada awalnya dirinya belum memahami prosedur pindah memilih dan mengira bahwa apabila data pemilih masih terdaftar di daerah asal, maka ia harus kembali ke daerah tersebut untuk dapat menggunakan hak pilih.

Namun, Daffa mendapatkan informasi mengenai pindah memilih dari teman sekosnya, yaitu Abdul Rasyid, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang juga berasal dari Ampah. Abdul Rasyid sebelumnya telah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan kemudian mengajak Daffa untuk ikut mengurus pindah memilih agar tetap dapat mencoblos di Banjarmasin. Pada awal proses, Daffa mengaku sempat merasa bingung mengenai prosedur pindah memilih, mulai dari persyaratan administrasi hingga tahapan pengurusannya. Akan tetapi, karena mendapatkan penjelasan langsung dari temannya dan menjalani proses pengurusan secara bersama-sama, ia menjadi lebih memahami mekanisme yang

harus dilakukan. Menurutnya, pengaruh lingkungan pertemanan memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong partisipasi mahasiswa dalam pemilu.

Setelah memahami alur pengurusan, Daffa mulai melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan untuk pindah memilih. Meskipun terdapat beberapa tahapan administrasi yang harus dilalui, proses tersebut terasa lebih mudah karena adanya arahan dan informasi yang jelas. Pada akhirnya, ia berhasil melakukan pindah memilih dan dapat menggunakan hak suaranya di Banjarmasin. Selain menggunakan hak pilih, Daffa juga beberapa kali mengikuti diskusi santai bersama teman-teman kos mengenai pemilu, calon presiden, dan isu politik yang sedang ramai diperbincangkan. Sebagian besar informasi yang ia peroleh berasal dari media sosial dan percakapan bersama teman-temannya.

Menurut Daffa, lingkungan pertemanan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat partisipasi mahasiswa dalam politik. Apabila lingkungan sekitar aktif membahas pemilu dan memiliki kepedulian terhadap politik, maka mahasiswa lain biasanya akan lebih tertarik dan sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih. Adapun hambatan yang ia alami pada awalnya adalah kurangnya informasi mengenai pindah memilih. Ia mengaku bahwa apabila tidak mendapatkan ajakan dan informasi dari Abdul Rasyid, kemungkinan besar ia juga tidak akan mengetahui prosedur tersebut dan akhirnya

tidak ikut memilih. Oleh karena itu, ia menilai bahwa kurangnya sosialisasi masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi mahasiswa rantau.

Menurut Daffa, rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pemilu juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur pemilu, khususnya terkait pindah memilih. Selain itu, sebagian mahasiswa menganggap proses administrasi tersebut cukup rumit sehingga memilih untuk tidak mengurusnya. Secara umum, Daffa menilai bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan dengan cukup baik dan tertib. Ia juga menyampaikan bahwa suasana pada hari pemungutan suara berlangsung aman dan lancar. Selain itu, ia percaya bahwa suara mahasiswa memiliki pengaruh penting dalam demokrasi karena mahasiswa dan generasi muda merupakan kelompok pemilih dalam jumlah besar yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Sebagai harapan ke depan, Daffa menginginkan agar sosialisasi mengenai pemilu, khususnya terkait pindah memilih, dapat dilakukan secara lebih luas dan aktif menjangkau lingkungan mahasiswa. Menurutnya, sosialisasi dapat dilakukan melalui kampus, media sosial, maupun kegiatan langsung di lingkungan kos mahasiswa rantau. Selain itu, ia juga berharap agar prosedur pindah memilih dapat dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami. Dengan informasi yang jelas dan akses

yang lebih mudah, ia meyakini bahwa semakin banyak mahasiswa rantau yang akan berpartisipasi dalam pemilu di masa mendatang.¹²

2. Matriks Hasil Wawancara

Peneliti akan menyajikan deskripsi singkat hasil wawancara dalam bentuk matriks. Mengenai Analisis Partisipasi Mahasiswa Kota Banjarmasin Pada Pemilihan Umum 2024. Sehingga lebih mudah untuk di pahami sebagai berikut:

Tabel 4.3 Matriks Hasil Wawancara dengan KPU Kota Banjarmasin

NO	Informan	Analisis Partisipasi Mahasiswa Kota Banjarmasin pada PEMILU 2024 Menurut KPU Kota Banjarmasin	Kendala KPU Kota Banjarmasin
1.	Azhari Fadli, Anggota KPU Kota Banjarmasin (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM)	Partisipasi mahasiswa pada Pemilu 2024 meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh tingginya antusias mahasiswa dalam menggunakan hak pilih serta pengaruh media sosial. KPU melakukan sosialisasi melalui media sosial dan program “KPU Goes to Campus” di beberapa kampus seperti Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Negeri Antasari, dan	kendala berupa keterbatasan waktu dan jangkauan sosialisasi sehingga belum dapat mendatangi seluruh kampus di Banjarmasin. Selain itu, masih ada mahasiswa yang kurang peduli terhadap politik serta kurang memperhatikan

¹² Daffa Andika. Pemilih melakukan Pindah memilih Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi, di YJ Kopi Kayu Tangi Banjarmasin*, 11 Mei 2026, 20.00 WITA

		Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Program tersebut dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran politik mahasiswa dan pemahaman tentang pentingnya pemilu	informasi pemilu di media sosial. Kendala administratif juga dialami mahasiswa perantau yang belum mengurus pindah memilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilih secara maksimal.
--	--	--	--

Tabel 4.4 Matriks Hasil Wawancara dengan Mahasiswa

NO	Informan	Analisis Partisipasi Mahasiswa Kota Banjarmasin pada PEMILU 2024 Menurut Mahasiswa Kota Banjarmasin	Kendala yang di hadapi Mahasiswa
1.	Muhammad Rijal	Rijal memiliki kesadaran bahwa Pemilu 2024 penting sebagai sarana menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Namun, ia tidak menggunakan hak pilih karena tidak sempat mengurus pindah memilih dari Buntok ke Banjarmasin.	Kurangnya informasi mengenai prosedur pindah memilih, syarat administrasi, alur pengurusan, dan batas waktu pendaftaran. Selain itu, kesibukan kuliah membuatnya tidak sempat mengurus administrasi.

2.	Muhamad Abdul Qomaruddin	Qomar ikut berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 dengan melakukan pindah memilih dan menjadi PTPS. Partisipasinya didorong oleh kesadaran pribadi dan tanggung jawab dalam pengawasan pemilu.	Pada awalnya mengalami kebingungan terkait prosedur pindah memilih dan administrasi, tetapi berhasil diatasi dengan mencari informasi dari internet, teman, dan penyelenggara pemilu.
3.	Mujainah	Mujainah tidak ikut mencoblos pada Pemilu 2024 meskipun memahami pentingnya peran mahasiswa dalam demokrasi.	Minimnya sosialisasi mengenai pindah memilih membuatnya mengira harus pulang ke daerah asal di Tanjung untuk memilih.
4.	Abdul Rasyid	Abdul Rasyid ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dengan melakukan pindah memilih dari Ampah ke Banjarmasin. Partisipasinya dipengaruhi oleh sosialisasi KPU yang membuatnya memahami prosedur pindah memilih.	Kendala tidak terlalu besar, namun menurutnya mahasiswa yang tidak mengikuti sosialisasi cenderung mengalami kebingungan administrasi pindah memilih.

5.	Regina Yulia Rakhmah	Regina tidak ikut memilih pada Pemilu 2024 meskipun memiliki kesadaran politik dan menganggap suara mahasiswa penting dalam demokrasi.	Kurangya informasi mengenai prosedur pindah memilih, syarat administrasi, dan batas waktu pengurusan. Kesibukan kuliah juga membuatnya tidak bisa pulang ke Amuntai.
6.	Hamidatul Hasanah	Mida tidak menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 karena sebagai pemilih pemula ia masih minim pemahaman mengenai teknis pemilu.	Kurangya pengetahuan mengenai pindah memilih sehingga ia mengira harus pulang ke daerah asal di Amuntai untuk mencoblos.
7.	Muhammad Riyan Maulana	Iyan tidak ikut mencoblos pada Pemilu 2024 meskipun memiliki keinginan untuk berpartisipasi.	Minimnya informasi mengenai prosedur pindah memilih, syarat administrasi, tempat pengurusan, dan batas waktu pengajuan. Sosialisasi yang kurang jelas membuatnya bingung.

8.	Daffa Andika	Daffa ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dengan melakukan pindah memilih dari Ampah ke Banjarmasin. Partisipasinya dipengaruhi oleh bantuan dan arahan temannya, Abdul Rasyid.	Pada awalnya kurang memahami prosedur pindah memilih, tetapi akhirnya dapat mengurus administrasi setelah mendapatkan bantuan informasi dari temannya.
----	-----------------	---	--

C. Analisis Data

1. Analisis Partisipasi Mahasiswa Kota Banjarmasin pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan Analisis Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, diperoleh hasil bahwa Analisis Partisipasi Mahasiswa Kota Banjarmasin Pada Pemilihan Umum 2024. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap sembilan informan, penelitian ini berhasil mengumpulkan gambaran nyata tentang bagaimana mahasiswa di Kota Banjarmasin berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Para informan terdiri dari satu anggota KPU Kota Banjarmasin serta delapan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, yaitu UIN Antasari Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat (ULM), dan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA).

Dari delapan mahasiswa yang diwawancarai, hanya tiga orang yang berhasil menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024, yaitu Qomar,

Abdul Rasyid, dan Daffa. Sementara lima informan lainnya, yakni Rijal, Mujainah, Regina, Mida, dan Iyan, tidak dapat menggunakan hak pilih mereka. Yang menarik adalah bahwa tidak ikut sertaan mereka bukan karena sikap tidak peduli atau apatis terhadap politik, melainkan sebagian besar disebabkan oleh kendala administratif, terutama persoalan pindah memilih bagi mahasiswa perantau.

a. Analisis Berdasarkan Teori Tindakan Sosial Max Weber

Teori Tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Max Weber membagi tindakan manusia ke dalam empat kategori, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Kerangka teori ini sangat relevan untuk membedah pola partisipasi mahasiswa Banjarmasin dalam Pemilu 2024.¹³

1) Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan rasional instrumental terjadi ketika seseorang secara sadar mempertimbangkan tujuan dan cara untuk mencapainya. Dalam penelitian ini, pola tindakan ini terlihat jelas pada diri Qomar dan Abdul Rasyid. Keduanya secara aktif mencari informasi, mengurus prosedur pindah memilih, dan memastikan diri mereka terdaftar di TPS yang baru karena memiliki keyakinan bahwa suara mereka berkontribusi nyata terhadap hasil pemilu.

¹³ Max Weber, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 87.

Qomar, yang juga berperan sebagai Pengawas TPS (PTPS), memiliki dorongan tambahan berupa tanggung jawab kelembagaan. Ia rela melewati proses administrasi yang cukup panjang karena menyadari bahwa perannya menuntut keterlibatan langsung dalam proses pemilu. Sementara itu, Abdul Rasyid mendapatkan pemahaman yang cukup dari sosialisasi KPU, sehingga ia merasa mampu dan terdorong untuk melaksanakan hak pilihnya secara penuh.

Hal ini sejalan dengan pandangan Weber bahwa tindakan rasional instrumental lahir dari kalkulasi yang matang antara tujuan yang ingin dicapai dengan cara-cara yang tersedia. Ketika mahasiswa memahami bahwa suara mereka adalah instrumen perubahan, maka mereka akan berupaya secara aktif untuk dapat menggunakannya.

2) Tindakan Rasional Berorientasi Nilai

Berbeda dengan kalkulasi rasional, tindakan yang berorientasi nilai digerakkan oleh keyakinan moral tanpa terlalu memperhitungkan untung rugi. Hampir seluruh informan dalam penelitian ini, baik yang berhasil memilih maupun yang tidak, memiliki kesadaran bahwa berpartisipasi dalam pemilu merupakan kewajiban moral sebagai warga negara.

Rijal misalnya, secara tegas menyatakan bahwa ia menyadari tanggung jawab moral mahasiswa untuk ikut dalam pemilu.

Mujainah pun menegaskan bahwa ketidakhadirannya di TPS bukan karena tidak peduli, melainkan karena terkendala informasi. Hal yang sama disampaikan oleh Mida dan Regina, yang keduanya menyebutkan bahwa pemilu adalah hak warga negara yang seharusnya digunakan.

Temuan ini menunjukkan bahwa nilai kesadaran berdemokrasi sudah tertanam pada sebagian besar mahasiswa. Namun sayangnya, nilai tersebut tidak selalu berhasil diwujudkan ke dalam tindakan nyata karena terbentur hambatan teknis dan administratif. Ini menjadi catatan penting bahwa kesadaran nilai saja tidak cukup tanpa dukungan sistem yang memadai.

3) Tindakan Afektif

Tindakan afektif adalah tindakan yang didorong oleh perasaan atau emosi. Dalam konteks penelitian ini, pola ini terlihat pada cara mahasiswa merespons dinamika pemilu melalui media sosial dan diskusi dengan teman sebaya. Regina dan Mida, meskipun tidak memilih, mengaku aktif mengikuti perkembangan pemilu melalui media sosial dan terlibat dalam diskusi santai bersama rekan-rekan mereka.

Antusiasme emosional terhadap pemilu juga tampak dari cara mahasiswa mengikuti perbincangan tentang calon presiden dan isu-isu politik yang ramai diperbincangkan. Kondisi ini menandakan bahwa secara afektif, mahasiswa sebenarnya tidak

apatis terhadap pemilu. Mereka peduli, mereka mengikuti perkembangan, dan mereka punya pandangan terhadap tokoh-tokoh politik. Hanya saja, kepedulian emosional ini belum selalu berhasil diterjemahkan menjadi partisipasi elektoral secara formal.

4) Tindakan Afektif

Tindakan tradisional merujuk pada kebiasaan atau pengaruh lingkungan sosial yang sudah mengakar. Temuan dari wawancara memperlihatkan bahwa pengaruh keluarga dan teman sebaya memainkan peran signifikan dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa. Mida menyebutkan bahwa orang tuanya mendorongnya untuk ikut memilih karena hal itu merupakan hak warga negara. Daffa bahkan mengaku bahwa jika tidak diajak oleh temannya, Abdul Rasyid, kemungkinan besar ia tidak akan mengurus pindah memilih sama sekali.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa jaringan sosial di kalangan mahasiswa, baik dalam lingkup keluarga maupun pertemanan, memiliki daya dorong yang cukup kuat dalam mendorong atau menghambat partisipasi politik. Sosialisasi melalui jalur informal ini terbukti efektif, bahkan dalam beberapa kasus lebih berhasil dibanding sosialisasi formal dari KPU.

b. Analisis Berdasarkan Teori Efikasi Politik

Teori Efikasi Politik membedakan antara efikasi internal, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya dalam memahami dan

berpartisipasi dalam politik, dan efikasi eksternal, yaitu kepercayaan individu terhadap daya respons sistem politik terhadap aspirasi masyarakat.¹⁴

1) Efikasi Politik Internal

Dari hasil wawancara, terlihat adanya variasi yang cukup signifikan dalam tingkat efikasi politik internal di antara para informan. Mahasiswa yang berhasil menggunakan hak pilihnya, seperti Qomar, Abdul Rasyid, dan Daffa, menunjukkan efikasi internal yang lebih tinggi. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka mampu memahami prosedur pemilu dan bahwa suara mereka benar-benar bermakna.

Sebaliknya, mahasiswa yang tidak memilih seperti Iyan dan Mida mengungkapkan bahwa mereka merasa kebingungan dengan prosedur administratif. Rasa tidak mampu mengikuti alur yang dianggap rumit ini mencerminkan efikasi internal yang rendah, yang pada akhirnya menjadi penghalang partisipasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang memperkuat rasa percaya diri mahasiswa dalam mengikuti proses pemilu sangat diperlukan.

2) Efikasi Politik Eksternal

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.373-374.

Di sisi efikasi eksternal, hampir semua informan mahasiswa menilai bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 secara teknis sudah berjalan dengan baik dan cukup transparan. Namun demikian, mereka memiliki catatan kritis terhadap sistem sosialisasi dan akses informasi bagi pemilih perantau. Banyak mahasiswa yang merasa sistem belum sepenuhnya mampu menjangkau dan mengakomodasi kebutuhan mereka sebagai pemilih yang berada jauh dari daerah asal.

c. Analisis Berdasarkan Perspektif Haqq Al-Intikhab dalam Islam

Konsep Haqq al-intikhab dalam Fiqih Siyasa menempatkan hak pilih bukan sekadar hak konstitusional, tetapi sebagai amanah yang harus ditunaikan secara bertanggung jawab. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi yang menyatakan bahwa golput bisa dihukum haram ketika berakibat terpilihnya pemimpin yang tidak amanah, menjadi landasan normatif yang relevan dalam mengkaji fenomena ini.¹⁵

Menariknya, hampir semua informan mahasiswa dalam penelitian ini, termasuk mereka yang pada akhirnya tidak dapat memilih, secara sadar mengakui pentingnya berpartisipasi dalam pemilu sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara dan umat Islam. Rijal, misalnya, secara eksplisit menyatakan bahwa mahasiswa

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi. (1997). *Fiqh Dawlah*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999, hlm. 166.

memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta, mengingat dampak kebijakan pemilu terhadap masa depan generasi muda.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai keislaman tentang tanggung jawab berdemokrasi telah cukup terinternalisasi di kalangan mahasiswa UIN Antasari. Namun, internalisasi nilai semata tidak cukup apabila tidak disertai dengan fasilitas dan kemudahan akses yang memungkinkan nilai tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata. Sehingga dari perspektif Haqq al-intikhab, tanggung jawab bukan hanya ada di pundak individu pemilih, tetapi juga pada institusi negara yang berkewajiban menyediakan sistem yang memudahkan masyarakat untuk menunaikan amanah tersebut.

2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

a. Faktor Pendorong Partisipasi

1) Akses Informasi yang Memadai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memperoleh informasi mengenai prosedur pindah memilih (DPTb), baik melalui sosialisasi KPU maupun teman sebaya, cenderung berhasil menggunakan hak pilihnya. Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi politik Ramlan Surbakti yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh kesadaran politik seseorang. Kesadaran politik terbentuk melalui pengetahuan dan informasi

yang diperoleh dari media, pendidikan, maupun lingkungan sosial. Mahasiswa yang memahami prosedur pemilu memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi sehingga terdorong untuk berpartisipasi aktif.

Dari perspektif Teori Efikasi Politik, informasi yang memadai meningkatkan efikasi politik internal mahasiswa, yaitu keyakinan bahwa mereka mampu memahami proses politik dan melaksanakan hak politiknya dengan benar. Semakin tinggi pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme pemilu, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara.

2) Pengaruh Lingkungan Pertemanan

Faktor pertemanan yang dialami Daffa menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk partisipasi politik mahasiswa. Temuan ini sesuai dengan pendapat Surbakti bahwa situasi lingkungan, termasuk teman sebaya, merupakan faktor yang memengaruhi partisipasi politik seseorang. Informasi yang diperoleh melalui jaringan pertemanan mampu meningkatkan kesadaran politik dan mendorong keterlibatan dalam pemilu.

Menurut Teori Tindakan Sosial Max Weber, tindakan Daffa untuk ikut memilih dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial tradisional dan afektif. Tradisional karena keputusan tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan atau dorongan lingkungan sosial di

sekitarnya, sedangkan afektif karena terdapat unsur kedekatan emosional dan kepercayaan terhadap ajakan temannya. Dengan demikian, keputusan untuk berpartisipasi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga dipengaruhi hubungan sosial yang dimiliki mahasiswa.

3) Kesadaran Tanggung Jawab Sosial dan Moral

Mahasiswa yang menggunakan hak pilihnya menyatakan bahwa mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara. Faktor ini dapat dijelaskan melalui Teori Tindakan Sosial Weber sebagai tindakan rasional berorientasi nilai (*wertrational*), yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan keyakinan terhadap nilai-nilai tertentu, seperti demokrasi, tanggung jawab warga negara, dan kepentingan bersama. Mahasiswa tetap memilih karena menganggap partisipasi politik sebagai kewajiban moral yang harus dijalankan.

Selain itu, dalam perspektif Teori Hak Pilih (*Haqq al-Intikhab*), penggunaan hak pilih dipandang sebagai amanah yang harus ditunaikan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, kesadaran mahasiswa untuk memilih menunjukkan adanya pemahaman bahwa partisipasi politik bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban moral sebagai warga negara. Faktor Penghambat Partisipasi.

b. Faktor Pendorong Partisipasi

1) Kendala Administratif Pindah Memilih

Hambatan terbesar yang ditemukan dalam penelitian adalah ketidaktahuan mahasiswa perantau mengenai prosedur pindah memilih (DPTb). Akibatnya, mereka tidak dapat menggunakan hak pilih meskipun memiliki keinginan untuk berpartisipasi. Kondisi ini menunjukkan rendahnya akses informasi politik yang berdampak pada rendahnya kesadaran politik sebagaimana dijelaskan oleh Surbakti. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme administrasi pemilu menyebabkan mahasiswa gagal berpartisipasi meskipun memiliki hak pilih.

Dalam Teori Efikasi Politik, kondisi ini mencerminkan rendahnya efikasi politik internal. Mahasiswa merasa tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang cukup untuk mengurus prosedur administrasi pemilu sehingga memilih untuk tidak melanjutkan proses tersebut. Akibatnya, partisipasi politik menjadi terhambat. Hambatan ketiga adalah kesibukan perkuliahan yang membuat mahasiswa tidak sempat secara aktif mencari informasi pemilu. Bagi mahasiswa perantau yang sudah disibukkan oleh tugas dan kegiatan kampus, mengurus prosedur tambahan seperti pindah memilih dirasakan sebagai beban tambahan yang terlalu menyita waktu dan tenaga.

2) Minimnya Sosialisasi dari KPU

Keterbatasan jangkauan program sosialisasi KPU menyebabkan banyak mahasiswa tidak mengetahui prosedur pindah memilih maupun pentingnya partisipasi dalam pemilu. Temuan ini berkaitan dengan faktor efektivitas pemerintah yang dikemukakan oleh Surbakti. Semakin efektif pemerintah atau penyelenggara pemilu dalam memberikan informasi kepada masyarakat, semakin tinggi tingkat partisipasi politik yang dapat dicapai. Sebaliknya, sosialisasi yang kurang maksimal akan menurunkan partisipasi masyarakat.

Dari sudut pandang Efikasi Politik Eksternal, kurang optimalnya sosialisasi dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem politik belum sepenuhnya memfasilitasi kebutuhan pemilih, khususnya mahasiswa perantau. Akibatnya, kepercayaan mahasiswa terhadap kemampuan sistem dalam mengakomodasi partisipasi mereka menjadi berkurang.

3) Kesibukan Perkuliahan

Kesibukan akademik membuat sebagian mahasiswa tidak sempat mencari informasi maupun mengurus proses pindah memilih. Dalam Teori Tindakan Sosial Weber, keputusan untuk tidak mengurus administrasi pemilu dapat dipahami sebagai tindakan rasional instrumental (zweckrational). Mahasiswa mempertimbangkan bahwa waktu,

tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus pindah memilih lebih besar dibandingkan manfaat yang mereka rasakan saat itu. Oleh karena itu, mereka memilih memprioritaskan kegiatan akademik dibandingkan urusan pemilu.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki kesadaran politik, faktor situasional seperti keterbatasan waktu dapat menghambat realisasi partisipasi politik dalam bentuk penggunaan hak pilih.

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi mahasiswa dalam Pemilu 2024 dipengaruhi oleh faktor informasi, lingkungan sosial, dan kesadaran politik sebagai faktor pendorong, serta kendala administratif, minimnya sosialisasi, dan kesibukan akademik sebagai faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut selaras dengan teori partisipasi politik Ramlan Surbakti yang menekankan pentingnya kesadaran politik, lingkungan sosial, dan efektivitas pemerintah dalam mendorong partisipasi. Selain itu, Teori Tindakan Sosial Max Weber menjelaskan bahwa keputusan mahasiswa untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi merupakan tindakan yang didasarkan pada pertimbangan rasional, nilai-nilai moral, emosi, maupun pengaruh lingkungan sosial. Sementara itu, Teori Efikasi Politik menunjukkan bahwa tingkat keyakinan mahasiswa terhadap kemampuan dirinya memahami proses politik dan kemudahan akses terhadap sistem politik sangat menentukan tingkat partisipasi mereka dalam Pemilu 2024.

2. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Dari keterangan Bapak Azhari Fadli selaku anggota KPU Kota Banjarmasin Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM, diketahui bahwa KPU telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam Pemilu 2024. Secara umum, upaya tersebut mencakup dua strategi utama, yaitu sosialisasi digital melalui media sosial dan sosialisasi tatap muka melalui program 'KPU Goes to Campus'.

Program 'KPU Goes to Campus' dinilai cukup efektif karena memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara petugas KPU dan mahasiswa. Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dan mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci dibanding sekadar membaca informasi di media sosial. Beberapa kampus seperti ULM, UIN Antasari, dan UNISKA sudah pernah menjadi lokasi sosialisasi ini.

Namun demikian, KPU juga mengakui adanya berbagai keterbatasan. Pertama, jangkauan sosialisasi masih belum merata ke seluruh kampus yang ada di Banjarmasin. Kedua, di ranah digital, konten KPU kalah bersaing dengan konten dari influencer atau publik figur yang lebih diminati mahasiswa. Ketiga, masalah administratif bagi pemilih perantau belum sepenuhnya terselesaikan, meskipun KPU sudah menyediakan mekanisme penggunaan KTP di TPS setelah pukul 12.00 siang.

Dari perspektif Teori Efikasi Politik, upaya sosialisasi KPU yang berhasil menjangkau mahasiswa terbukti meningkatkan efikasi internal dan eksternal sekaligus. Mahasiswa yang mendapat sosialisasi merasa lebih mampu dan lebih percaya diri untuk mengurus pindah memilih, serta lebih yakin bahwa sistem pemilu berjalan secara adil dan transparan. Ini memperkuat argumen bahwa investasi dalam sosialisasi yang tepat sasaran adalah kunci peningkatan partisipasi.

Dari keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi mahasiswa Kota Banjarmasin dalam Pemilu 2024 bersifat kompleks dan multidimensi. Sebagian besar mahasiswa sebenarnya memiliki kesadaran dan keinginan untuk berpartisipasi. Namun secara struktural, sistem yang ada belum sepenuhnya ramah bagi mahasiswa perantau yang merupakan segmen pemilih yang cukup besar di kota ini.

Menggunakan kerangka Teori Tindakan Sosial Weber, partisipasi mahasiswa yang berhasil lebih banyak didorong oleh kombinasi tindakan rasional-nilai (kesadaran moral berdemokrasi) dan tindakan tradisional (pengaruh lingkungan sosial), yang kemudian diperkuat oleh akses informasi yang cukup sehingga memunculkan tindakan rasional-instrumental dalam bentuk pengurusan pindah memilih. Sedangkan mahasiswa yang tidak berpartisipasi mengalami situasi di mana motivasi nilai yang ada tidak cukup kuat untuk mengatasi hambatan struktural yang ada.

Dari sudut pandang Teori Politainment, media sosial berhasil menciptakan keterlibatan emosional mahasiswa terhadap pemilu, tetapi belum mampu mendorong konversi dari partisipasi digital ke partisipasi elektoral secara optimal. Sementara dari perspektif Haqq Al- Intikhab, penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab memfasilitasi penunaian hak pilih tidak hanya ada pada individu, tetapi juga pada institusi negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa solusi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemilu tidak cukup hanya dengan mengandalkan peningkatan kesadaran individu. Diperlukan pula pembenahan sistematis, khususnya dalam hal kemudahan prosedur pindah memilih, perluasan jangkauan sosialisasi ke lingkungan kampus, dan pemanfaatan platform digital yang relevan bagi kehidupan mahasiswa.